

ABSTRAK

Penelitian ini berawal dari adanya fenomena kekerasan seksual yang tiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah kasus. Fenomena kekerasan seksual ini seperti fenomena gunung es yang artinya masih banyak data kekerasan seksual yang tidak terlapor dibandingkan dengan data yang dilaporkan. Korban kekerasan seksual terutama perempuan dalam masyarakat seringkali hak mereka sebagai korban tidak dapat terpenuhi.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Lokasi penelitian di Kota Surabaya di mana kasus kekerasan seksual juga tinggi terjadi di kota-kota besar. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, dan data sekunder lainnya. Informan dalam penelitian mengenai moderasi tentang fenomena kekerasan seksual sebanyak lima informan yang merupakan politisi perempuan anggota DPRD Jawa Timur di bidang gender dan berfokus pada kekerasan seksual terhadap perempuan. Selain itu, informan yang merupakan aktivis di KPI Jatim dan Savy Amira yang secara aktif menyuarakan hak dan keadilan korban kekerasan seksual. Teori yang digunakan adalah Teori Konstruksi Sosial oleh Berger dan Luckmann, dan Teori Dukungan Sosial oleh Sherburne & Stewart.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan seksual dikonstruksikan oleh politisi perempuan KPI Jatim dan Savy Amira sebagai tindakan yang menyerang seksualitas orang lain secara paksa oleh pelaku dan menyebabkan kerugian pada aspek fisik, psikis maupun ekonomi. Moderasi dilakukan didasari atas realitas di masyarakat yaitu pemberian stigma negatif terhadap perempuan korban kekerasan seksual dan tindakan intimidatif terhadap perempuan korban kekerasan seksual oleh oknum aparat penegak hukum. Optimalisasi penggunaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi produk sosial yang dilegitimasi sebagai landasan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual, dan isu-isu gender yang dihadapi oleh politisi perempuan. Politisi perempuan KPI Jatim dan Savy Amira bersama kelompok masyarakat lainnya terus melakukan advokasi terhadap pemerintah bagi terwujudnya keadilan gender, termasuk agenda pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). selain itu, peran sosialisasi bagi seluruh kalangan masyarakat dilakukan untuk mencegah terjadinya potensi kekerasan seksual yang akan datang.

Kata Kunci: moderasi, kekerasan seksual, perempuan korban kekerasan seksual.

ABSTRACT

This research originated from the phenomenon of sexual violence, which increases the number of cases each year. The phenomenon of sexual violence is like an iceberg phenomenon, which means that there are still a lot of unreported data on sexual violence compared to the data reported. Victims of sexual violence, especially women in society, often their rights as victims cannot be fulfilled.

This study uses a qualitative method with a case study approach. The research location is in the city of Surabaya where cases of sexual violence are also high in big cities. Data collection techniques were carried out by in-depth interviews, observation, and other secondary data. There were five informants in the study on moderation of the phenomenon of sexual violence, who were women politicians who were members of the DPRD of East Java in the field of gender and focused on sexual violence against women. In addition, the informant is an activist in the KPI Jatim and Savy Amira who actively advocates for the rights and justice of victims of sexual violence. The theory used is the Social Construction Theory by Berger and Luckmann, and Social Support Theory by Sherburne & Stewart.

The results showed that sexual violence was constructed by female politicians KPI Jatim and Savy Amira as an act that forcibly attacks another's sexuality by the perpetrator and causes harm to physical, psychological and economic aspects. Moderation is carried out based on the reality in society, namely the provision of a negative stigma against women victims of sexual violence and discriminatory actions against women victims of sexual violence by unscrupulous law enforcement officials. Optimizing the use of the Criminal Code (KUHP) as a legitimate social product as a legal basis for criminal acts of sexual violence, and gender issues faced by female politicians. Female politician KPI Jatim and Savy Amira along with other community groups continue to advocate for the government for the realization of gender justice. Including the agenda for the ratification of the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence (RUU PKS). In addition, the role of socialization for all members of society is carried out to prevent potential future sexual violence.

Keywords: *moderation, sexual violence, women victims of sexual violence.*